

**SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KEPADA MASYARAKAT**

(STUDI MODEL KOMUNKASI PEMBANGUNAN)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Progam Strata Satu (S-1)
Pada Program Studi Ilmu Komunikasi**



Oleh :

Athok Moh Nur Rozaqi
NIM. B06205030



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS DAKWAH
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**
2010

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
KLAS K D-2010 001 Kom	No REG : D-2010 / Kom / 001 ASAL BUKU : TANGGAL :

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Athok Moh Nur Rozaqi telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 13 Januari, 2010

Pembimbing,



Drs. Yoyon Mudjiono, M. Si

NIP. 195409071982031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **Athok Moh Nur Rozaqi** telah dipertahankan
di depan tim penguji skripsi

Surabaya, 09 Februari 2010

Mengesahkan,
Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. Aswadi, M. Ag
NIP. 196004121994031001.4/

Ketua



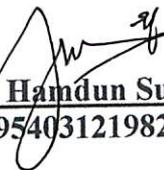
Drs. Yoyon Mudjiono, M. Si
NIP. 195409071982031003

Sekretaris



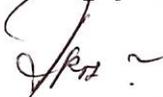
Yusuf Amrozi, M.M.T
NIP. 197607032008011014

Penguji I



Drs. H. M. Hamdun Sulhan, M. Si
NIP. 195403121982031002

Penguji II



Moch. Choirul Arif, M.Fil.I
NIP. 197110171998031001

ABSTRAKS

Athok Moh Nur Rozaqi, NIM. B06205030, 2009. Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Masyarakat (*Studi Model Komunikasi Pembangunan*). Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci : Model Komunikasi Pembangunan

Tidak semua sosialisasi kebijakan atau program dari pemerintah dapat dipahami dan diterima masyarakat. Terlebih jika kebijakan tersebut bersifat baru (*inovatif*). Banyak cara dalam mensosialisasikan suatu kebijakan, salah satunya dapat melalui dialog. Langkah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan menggelar dialog publik merupakan sebuah alternatif sebagai bentuk sosialisasi dalam menjelaskan kebijakannya kepada masyarakat. Skripsi ini mengkaji satu permasalahan yang *urgen* yaitu Bagaimana model komunikasi pembangunan dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat.

Untuk mengungkap permasalahan tersebut, dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan permasalahan secara luas. Selanjutnya peneliti mengumpulkan seluruh data yang akan di klasifikasi dengan berbagai pola dan bentuk agar mudah dalam membuat kesimpulan.

Dari temuan – temuan data yang telah ditemukan adanya penyelenggaraan dialog publik. Dialog publik merupakan kegiatan yang mempertemukan antara pemerintah dengan masyarakat, selain sebagai sosialisasi kegiatan tersebut untuk menjelaskan program atau kebijakan pemerintah agar dipahami masyarakat dan tidak salah penafsiran. Kemudian media atau saluran yang digunakan adalah khususnya radio sebagai bentuk peran dari pada salah satu media massa itu sendiri, yang dianggap mampu mengakomodir pesan agar tersebar kepada khalayak luas. Selanjutnya setelah berhasil dilakukan penelitian ditemukan bahwa model komunikasi pembangunan dalam mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat adalah model komunikasi langsung diantaranya model komunikasi antar pribadi / dialogis (*one step flow model*), komunikasi kelompok (*two step flow model*), komunikasi tidak langsung dan komunikasi bermedia (*multi step flow model*).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konsep	6
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KERANGKA TEORITIK	
A. Kajian Pustaka	13
1. Sosialisasi kebijakan pembangunan dan Tujuannya	13
2. Kebijakan Pembangunan	14
3. Pengertian Model Komunikasi dan Tugas Pokok Komunikasi Pembangunan	16
a. Pengertian Model	16
b. Fungsi Model	17
c. Model – Model Komunikasi	19
4. Tugas Pokok Komunikasi Pembangunan	23
5. Peranan Media Massa dalam Komunikasi Pembangunan	23
B. Kajian Teoritik	27
1. Teori Model Difusi inovasi	27
a. Komponen dan proses Difusi Inovasi	29
b. Tahapan Pengambilan Keputusan Inovasi	33
c. Agen Perubahan	34
2. Teori S-M-C-R	35
3. Teori Hubungan Sosial	36
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Subyek Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Tahap-tahap Penelitian.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	48

F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	51

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Setting Penelitian	53
1. Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro.....	53
2. Kondisi Umum.....	53
a. Luas Wilayah	53
b. Letak Geografis dan Topografis	54
c. Batas Wilayah	54
d. Wilayah Administratif	54
e. Jumlah Penduduk	55
f. Struktur Organisasi	55
g. Kepegawaian	50
h. Pertumbuhan Ekonomi	58
i. Keuangan Daerah	58
j. Investasi	59
k. Prasarana dan Sarana Ekonomi	60
l. Kondisi Sosial dan Budaya	62
B. Penyajian Data	70
C. Analisis Data.....	75
D. Pembahasan.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar informan jajaran	
Eksekutif kabupaten Bojonegoro	43
1.2 Jumlah PNS menurut	
latar belakang pendidikan	56
1.3 Kondisi pegawai	
menurut pangkat / golongan	56
1.4 Kondisi pegawai	
menurut jabatan struktur dan fungsional	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Model Komunikasi Difusi Inovasi	20
1.2 Model Komunikasi Lasswell	21
1.3 Peranan Komunikasi dalam Pembangunan	25
2.1 Penarikan Kesimpulan dan verifikasi Data	50
3.1 Model Komunikasi Satu Tahap	75
3.2 Model Komunikasi Dua Tahap	75
3.3 Model Komunikasi Banyak Tahap	76

berinovasi dalam merumuskan suatu kebijakan. Artinya, pemerintah mempunyai tanggung jawab lebih besar dalam menentukan arah kemajuan pembangunan Bojonegoro ke depan.

Sikap keterbukaan dan diiringi komitmen kuat upaya pemerintah dalam menggali dan memaksimalkan segala potensi yang ada, perlahan saat ini aspek pembangunan daerah Bojonegoro mulai lebih terlihat, terlebih seiring dengan dimulainya eksploitasi minyak mentah, terutama di blok Cepu. Kabupaten ini menjadi sorotan banyak pihak dan di kenal salah satu daerah yang termasuk memiliki anugerah potensi Sumber Daya Alam (SDA) berupa lahan minyak mentah yang cukup luar biasa, oleh karenanya sesuatu yang sangat wajar apabila pemerintah dan masyarakat Bojonegoro lebih mendambakan hasil pengelolaan SDA ini yang nantinya dapat dijadikan bagian modal utama dalam rangka membangun daerahnya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Baik secara suprastruktur maupun infrastruktur, namun yang paling penting adalah dapat menciptakan stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

Persoalan pembangunan pada prinsipnya adalah menyangkut nasib kehidupan seluruh lapisan masyarakat, maka idealnya kebijakan yang telah ditetapkan perlu diketahui oleh publik agar tidak terjadi kesalahpahaman (*miscommunication*) antara pihak yang memerintah dan diperintah. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak bisa dikesampingkan sebab di tengah lapisan masyarakat yang heterogen terdapat sistem – sistem sosial yang condong memiliki sikap aktif dan senantiasa mengawal proses jalannya suatu roda

kreatif, inovatif, dan kemudian dilanjutkan dengan cara sosialisasi yang tepat itulah yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari pada proses pembangunan. Informasi – informasi yang menyangkut suatu kebijakan terutama tentang konsep pembangunan sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi jika kebijakan tersebut bersifat baru.

Setiap pembangunan pasti akan selalu menghadapi masalah, demikian juga dalam proses pembangunan daerah. Masalah secara umum dapat disebutkan sebagai suatu yang dapat menimbulkan kondisi negatif, sehingga terjadi ketidakpuasan. Dalam hubungan dengan pembangunan daerah, permasalahan bisa diketahui melalui keluhan – keluhan masyarakat. Di sini terdapat apa perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, keluhan timbul sebagai pernyataan tidak terpenuhinya kepentingan seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat. Di mana partisipasi masyarakat dianggap suatu yang paling penting.

Langkah pemerintah kabupaten Bojonegoro saat ini menjadi salah satu aktifitas yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Dimana pemerintah telah memberikan akses terciptanya komunikasi partisipatif bagi masyarakat untuk secara bersama menyelesaikan permasalahan – permasalahan terutama menyangkut hal pembangunan. Yaitu, dengan menggelar acara dialog interaktif antara pihak pemerintah dan masyarakat yang diselenggarakan setiap satu minggu sekali dengan disiarkan secara langsung oleh media massa khususnya melalui sarana saluran radio lokal setempat. Eksistensi seperti media massa, disini jelas

1. Sosialisasi

Istilah kata sosialisasi tentu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat luas. Pemakaian kata ini biasanya sering kita dengar terutama terkait dengan adanya suatu program dari suatu pihak atau lembaga (pemilik program) untuk disampaikan ke pelaksana program yang akan direalisasikan. Sosialisasi adalah pendekatan yang didasarkan atas perbedaan khalayak sasaran. Dengan kata lain, sosialisasi merupakan bentuk upaya menyebarluaskan informasi kepada khalayak atau masyarakat luas. Hal itu dimaksudkan agar khalayak dapat menerima dan memahami isi dari pada informasi tersebut. Pada sisi teknisnya, sosialisasi dapat dilakukan dengan beragam model atau cara agar sosialisasi tersebut berjalan sesuai harapan dan seefektif mungkin.

2. Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.³ Kebijakan dalam konteks hubungan pemerintahan dan masyarakat biasanya disebut dengan istilah kebijakan publik.

Harrold Lasswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai – nilai, dan praktik – praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Penjelasannya, bahwa pengambil kebijakan telah

³ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal. 149

istilah modernisasi dan pembangunan, yang menyebabkan kedua istilah itu seringkali dianggap merupakan sinonim satu dengan yang lainnya.

Rogers (1969, 1971) mengartikan pembangunan sebagai proses – proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Yang paling sering, walaupun pengertian kedua istilah tersebut dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi di bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses yang analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan.

4. Model Komunikasi Pembangunan

Model secara sederhana adalah “gambaran” yang dirancang untuk mewakili kenyataan.⁴ Sedangkan komunikasi dan pembangunan dua hal yang saling berkaitan. Yang dimaksud model adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komunikasi lainnya. Penyajian model ini dimaksudkan untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi.⁵

Komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran pesan oleh seseorang kepada khalayak guna mengubah sikap, pandangan atau

⁴ Khisma, Azizah, *Model Komunikasi Pemerintah dan masyarakat pada Studi Kualitatif Aparat Pemerintah Kecamatan Pancu kabupaten Kediri*, (Skripsi, Fakultas dakwah IAIN Sunan Ampel, 2009), hal 40

⁵ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal. 5

perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan oleh seluruh rakyat.⁶

Dalam arti luas komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal – balik diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedang dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya cara, serta tehnik penyampaian gagasan, dan ketrampilan – ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Dengan demikian, dalam penelitian ini konsep dari model komunikasi pembangunan adalah gambaran mengenai proses komunikasi dalam suatu kegiatan proses pembangunan agar dapat diketahui bahwa melalui model komunikasi bisa dilihat faktor – faktor yang terlibat dalam proses komunikasi pada sebuah kegiatan sosialisasi kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintahan kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pemaparan skripsi ini dibagi menjadi lima bab pembahasan yang disusun secara sistematis. Adapun pokok pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

⁶ Onong Uchjana Effendy, *Spektrum Komunikasi*, (Bandung: CV. Mandar maju, 1992), hal,

Adapun tujuan sosialisasi secara umum adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan ‘makna’ dari konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah, masyarakat luas mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan program pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap publik, menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam siklus program dari kebijakan pemerintah. Sedangkan secara khusus adalah agar terdapatnya komitmen dan kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan memonitor-mensupervisi secara bersama-sama, dapat merangsang minat kelompok strategis dan kelompok peduli untuk melakukan tindakan baik dalam kerjasama maupun membangun pengawasan berbasis masyarakat, dan menyebarluaskan hasil-hasil perkembangan proyek pembangunan kepada masyarakat luas.

2. Kebijakan Pembangunan

Kebijakan dalam konteks hubungan pemerintahan dan masyarakat biasa disebut dengan istilah kebijakan publik (*public policy*). Harold Lasswell adalah pakar pertama yang mencanangkan studi kebijakan publik sebagai bagian dari ilmu sosial, dengan menempatkannya sebagai studi yang menggunakan multi metode. Kebijakan Publik adalah sebuah pedoman, acuan, strategi, dan kerangka tindakan yang dipilih atau

Komunikasi adalah proses dinamis yang melibatkan banyak unsur atau faktor. Kaitan antara faktor/unsur dengan unsur atau faktor lainnya dapat bersifat struktural atau fungsional. Dengan demikian model – model komunikasi juga memberikan gambaran pada kita tentang struktur dan hubungan fungsional dari unsur – unsur/faktor – faktor yang ada dalam sistem.

Pengertian struktur merujuk pada tatanan kedudukan dan garis hubungan antara satu unsur/faktor dengan unsur/faktor lainnya dalam sebuah sistem. Pengertian fungsional menunjuk pada peran dan tugas dari setiap unsur/faktor dalam sebuah sistem. Oleh karena itu, melalui sebuah model, kita akan dapat memahami secara mudah dan komprehensif mengenai struktur dan fungsi dari unsur – unsur atau faktor – faktor yang terlibat dalam proses komunikasi baik dalam konteks individual, di antara dua orang atau lebih, kelompok/organisasi ataupun dalam konteks komunikasi dengan masyarakat secara luas.

b. Fungsi Model

Menurut Deutsh (1966), model dalam konteks ilmu pengetahuan sosial, mempunyai empat (4) fungsi. *Pertama*, mengorganisasikan. Artinya model mengorganisasikan sesuatu hal dengan cara mengurutkan serta mengaitkan satu bagian atau sistem dengan bagian sistem lainnya. Sehingga kita memperoleh gambaran yang menyeluruh, tidak sepotong – potong. Aspek lainnya dari fungsi yang pertama ini adalah, bahwa model memberikan gambaran umum tentang suatu hal

dalam kondisi – kondisi tertentu. *Kedua*, model membantu menjelaskan. Meskipun model pada dasarnya tidak berisikan penjelasan, namun model membantu kita dalam menjelaskan tentang suatu hal melalui penyajian informasi yang sederhana. Tanpa model, informasi tentang suatu hal akan tampak rumit atau tidak jelas. *Ketiga*, fungsi “ heuristic ”. Artinya melalui model, kita akan dapat mengetahui sesuatu hal secara keseluruhan. Karena, model membantu kita dengan memberikan gambaran tentang komponen – komponen pokok dari sebuah proses atau sistem. *Keempat*, fungsi prediksi. Melalui model, kita dapat memperkirakan tentang hasil atau akibat yang akan dapat dicapai. Oleh karena itu, dalam dunia ilmiah model ini sangat penting, karena dapat dipergunakan sebagai dasar bagi para peneliti dalam merumuskan hipotesis, yakni pernyataan – pernyataan yang berisikan penjelasan mengenai kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antara satu faktor dengan faktor – faktor lainnya.

Ada juga yang menggambarkan model sebagai cara untuk menunjukkan sebuah objek, di mana di dalamnya dijelaskan *kompleksitas* suatu proses, pemikiran, dan hubungan unsur – unsur yang mendukungnya. Model dibangun agar kita dapat mengidentifikasi, menggambarkan atau mengkategorisasikan komponen – komponen yang relevan dari suatu proses. Sebuah model dapat dikatakan sempurna, jika ia mampu memperlihatkan semua aspek – aspek yang mendukung terjadinya sebuah proses. Misalnya dapat melakukan

adalah menunjuk kepada siapa yang mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi. Yang memulai komunikasi dapat berupa seseorang dan dapat juga sekelompok orang seperti organisasi atau persatuan.

Pertanyaan kedua adalah *says what* atau apa yang dikatakan, pertanyaan ini adalah yang berhubungan dengan isi komunikasi atau apa pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Umumnya kita menanyakan pertanyaan ini dalam pemikiran kita dalam berkomunikasi.

Pertanyaan ketiga adalah *to whom*. Pertanyaan ini maksudnya menanyakan siapa yang menjadi *audience* atau penerima dari komunikasi. Atau dengan kata lain kepada siapa komunikator berbicara atau kepada siapa pesan yang ia ingin disampaikan diberikan. Hal ini perlu diperhatikan karena penerima pesan ini, berbeda dalam banyak hal misalnya, pengalamannya, kebudayaannya, pengetahuannya, dan usianya.

Pertanyaan keempat adalah *in what channel* atau melalui media apa. Yang dimaksud media adalah alat komunikasi, seperti berbicara, gerakan badan, kontak mata, sentuhan, radio, televisi, surat, buku, dan gambar. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tidak semua media cocok untuk maksud tertentu.

Pertanyaan terakhir dari model ini adalah *what effect* atau apa efeknya dari komunikasi tersebut. Pertanyaan mengenai efek

- (4) Media massa dapat mengantarkan pengalaman – pengalaman yang seolah – olah dialami sendiri, sehingga mengurangi biaya psikis yang ekonomis untuk menciptakan kepribadian yang mobile.
- (5) Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi yang merupakan perangsang untuk bertindak nyata.
- (6) Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma – norma baru dan keharmonisan dari masa transisi.
- (7) Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu keputusan di tengah kehidupan masyarakat.
- (8) Komunikasi dapat merubah struktur kekuasaan pada masyarakat yang bercirikan tradisional, dengan membawakan pengetahuan kepada massa. Mereka yang memperoleh informasi, akan menjadi orang yang berarti, dan para pemimpin tradisional akan tertantang oleh kenyataan bahwa ada orang – orang lain yang juga mempunyai kelebihan dalam hal memiliki informasi.
- (9) Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan – kesetiaan lokal.
- (10) Komunikasi dapat membantu mayoritas populasi menyadari pentingnya arti mereka sebagai warga negara, sehingga dapat membantu meningkatkan aktivitas politik.

- (11) Komunikasi memudahkan perencanaan dan implementasi program – program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.
- (12) Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri.

B. Kajian Teoritik

1. Teori Model Difusi Inovasi

Teori ini dapat dikategorikan ke dalam pengertian peran komunikasi secara luas dalam merubah masyarakat melalui penyebarluasan ide – ide dan hal – hal yang baru. Menurut Rogers dan Shoemaker (1971). Teori ini biasanya juga banyak digunakan sebagai pendekatan dalam komunikasi pembangunan, terutama di daerah atau negara berkembang. Everett M. Rogers mendefinisikan *difusi* sebagai proses di mana suatu *inovasi* di komunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antar para anggota suatu sistem sosial. *Difusi* adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan – pesan sebagai ide baru. Sedangkan komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana para pelakunya menciptakan informasi dan saling pertukaran informasi tersebut untuk mencapai pengertian bersama.

Salah satu saluran komunikasi yang penting adalah media massa jadi model penelitian difusi adalah mengasumsikan bahwa media massa memiliki effect yang berbeda – beda pada titik – titik waktu yang

berlainan, mulai dari menimbulkan pengetahuan sampai mempengaruhi *adopsi* (penerimaan) atau terjadi *rejection* (penolakan) suatu inovasi. Secara operasionalisasi, model penelitian dengan menggunakan difusi inovasi (informasi) yang tersebar berupa informasi baru, berita, pesan – pesan, peristiwa dan gagasan baru disebarluaskan melalui berbagai media massa. Dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan penelitian difusi inovasi dan manfaat kemasyarakatan dalam kondisi sosial yang mengalami dinamika perubahan teknologi untuk menggantikan metode lama ke model penelitian baru.

Menurut Rakhmat, sejauhmana media massa atau saluran interpersonal dapat mempengaruhi efek difusi yang ditentukan oleh variabel antara yang disebut *anteseden*, dan variabel penerima (*receiver variable*) yang meliputi data demografis serta variabel sosiopsikologis.

Variabel efek difusi dapat berupa temporal, yakni menunjukkan pola adopsi gagasan baru dalam jangka waktu tertentu. *Spasial*, menunjukkan keteraturan tertentu dalam pola distribusi inovasi. Penyebaran inovasi, biasanya berasal dari pusat yang kemudian menyebarkan ke daerah – daerah sekitarnya dan daerah di luar yang berjauhan. Istilah struktural, dapat berbentuk dua tahap (*two step*) atau banyak tahap (*multi step*), dan *efek fasal*, yaitu mengacu pada fase – fase dalam proses penerimaan (*adopsi*).

a. Komponen – Komponen dan Proses Difusi Inovasi

Sesuai dengan pemikiran Rogers, dalam proses penyebarserapan difusi inovasi terdapat 4 (empat) komponen pokok, yaitu:

- (1) Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep 'baru' dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali. Sebab jika suatu inovasi telah diketahui oleh seseorang untuk jangka waktu tertentu (ia sadar akan hal tersebut), namun individu itu belum memutuskan sikap apakah menyukainya atau tidak, belum pula menyatakan menerima atau menolaknya, maka baginya, hal itu tetap suatu inovasi. Jadi, kebaruan inovasi tercermin dari pengetahuan, sikap, ataupun putusan terhadap inovasi yang bersangkutan. Dengan begitu, bisa saja sesuatu yang disebut sebagai inovasi bagi suatu masyarakat, namun tidak lagi dirasakan sebagai hal yang baru oleh orang atau masyarakat yang lainnya.
- (2) Saluran komunikasi; 'alat' untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi

kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.

- (3) Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
- (4) Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Suatu inovasi biasanya terdiri dari dua komponen, yakni komponen *ide* dan komponen objek (aspek material atau produk fisik dari ide tadi). Setiap inovasi memiliki komponen ide, namun banyak juga yang tidak mempunyai rujukan fisik. Penerimaan terhadap suatu inovasi yang memiliki kedua komponen tersebut memerlukan adopsi yang berupa tindakan (action). Sedang untuk inovasi yang hanya mempunyai komponen ide, penerimaannya pada hakikatnya lebih merupakan suatu

putusan simbolik. Lebih lanjut teori yang dikemukakan Rogers (1995) memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan inovasi.

Dalam pandangan masyarakat yang menjadi *klien* dalam penyebarserapan inovasi, ada lima atribut yang menandai setiap gagasan atau cara – cara baru yang dimaksud, yaitu :

- (1) *Keuntungan – keuntungan relatif (relative advantage)* ; yaitu apakah cara – cara atau gagasan baru ini memberikan keuntungan relatif bagi mereka yang kelak akan menerimanya.
- (2) *Keserasian (compatibility)* ; yaitu apakah inovasi yang hendak didifusikan itu serasi dengan nilai – nilai, sistem kepercayaan, gagasan yang terlebih dahulu diperkenalkan sebelumnya, kebutuhan, selera, adat – istiadat, dan sebagainya dari masyarakat yang bersangkutan.
- (3) *Kerumitan (complexity)* ; yakni apakah inovasi tersebut dirasakan rumit. Pada umumnya masyarakat tidak atau kurang berminat pada hal – hal yang rumit, sebab selain sukar untuk dipahami, juga cenderung dirasakan merupakan tambahan beban baru.
- (4) *Dapat dicobakan (trialability)* ; yaitu bahwa suatu inovasi akan lebih cepat diterima, bila dapat dicobakan dulu dalam ukuran kecil sebelum orang terlanjur menerimanya secara menyeluruh. Ini adalah cerminan prinsip manusia yang selalu ingin menghindari suatu risiko yang besar dari perbuatannya.

(5) *Dapat dilihat (observability)* ; jika suatu inovasi dapat disaksikan dengan mata, dapat terlihat secara langsung hasilnya, maka orang akan lebih mudah untuk mempertimbangkan untuk menerimanya, ketimbang bila inovasi itu berupa sesuatu yang abstrak, yang hanya dapat diwujudkan dalam fikiran, atau hanya dapat dibayangkan.

Masyarakat yang menghadapi suatu penyebarserapan inovasi, oleh Rogers dan Shoemaker (1971) dikelompokkan dalam golongan – golongan:

(1) *Inovator*, yakni mereka yang memang sudah pada dasarnya menyenangi hal – hal baru, dan rajin melakukan percobaan.

(2) *Penerimaan dini, (early adopters)*, yaitu orang – orang yang berpengaruh, tempat teman – teman sekelilingnya memperoleh informasi, dan merupakan orang – orang yang lebih maju dibanding orang sekitarnya.

(3) *Mayoritas dini (early majority)*, yaitu orang – orang yang menerima suatu inovasi selangkah lebih dahulu dari rata – rata kebanyakan orang – orang lainnya.

(4) *Mayoritas belakangan (late majority)*, yakni orang – orang yang baru bersedia menerima suatu inovasi apabila menurut penilaiannya semua orang sekelilingnya sudah menerima.

(5) *Laggards*, yaitu lapisan yang paling akhir dalam menerima suatu inovasi.

3. Teori Hubungan Sosial

Teori yang diketengahkan oleh Melvin DeFleur ini menunjukkan bahwa hubungan sosial secara informal berperan penting dalam mengubah perilaku seseorang ketika diterpa pesan komunikasi massa. Suatu penelitian menemukan adanya semacam kegiatan informasi melalui dua tahapan dasar. Pertama, informasi bergerak dari media kepada orang – orang yang secara relatif banyak pengetahuannya (*well informed*); kedua, informasi bergerak dari orang – orang itu melalui saluran antarpribadi (*interpersonal channel*) mereka yang kurang diterpa media dan banyak bergantung kepada orang lain mengenai suatu informasi. Situasi komunikasi seperti ini dikenal sebagai arus komunikasi dua tahap (*two step flow of communication*).

Orang yang sering terlibat dalam komunikasi dengan media massa itu disebut pemuka pendapat sebagai terjemahan dari *opinion leader*. Mereka tidak hanya meneruskan informasi, tetapi juga menginterpretasi terhadap pesan komunikasi yang mereka terima. Sejenis pengaruh pribadi (*personal influence*) ini segera diakui sebagai mekanisme antara yang penting, yang beroperasi antara pesan komunikasi massa dengan tanggapan (perilaku) terhadap pesan itu. Jika suatu gagasan baru datang dari luar ; interpretasi yang diberikan para “*opinion leader*” bisa

1. Karena metode jenis deskriptif kualitatif yang mana jenis data tersebut sangat sesuai dengan judul yang diangkat peneliti yakni sosialisasi kebijakan pembangunan pemerintahan kabupaten Bojonegoro kepada masyarakat karena dalam penelitian ini akan diusahakan penggambaran mengenai fenomena langsung di lapangan atau semua keadaan yang bersifat fakta.
2. Karena penelitian kualitatif mengungkap segala hal yang ada dalam bentuk model komunikasi pembangunan dalam sosialisasi kebijakan pembangunan pemerintahan kabupaten Bojonegoro, maka peneliti harus menggali data dengan observasi langsung ke lapangan.
3. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi berupa deskripsi model komunikasi pembangunan yang berlangsung antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Khususnya komunikasi yang dikemas dalam bentuk dialog interaktif dan dilaksanakan hampir setiap satu minggu sekali. Dialog tersebut disiarkan secara langsung dengan jasa dan peran media massa, yaitu radio. Dengan demikian isi dari dialog tersebut, terutama yang berkenaan dengan bidang pembangunan dapat tersosialisasikan dan diterima oleh masyarakat luas.

Berbeda dari analisis pada data studi kualitatif, yang dilakukan sesuai aktivitas pengumpulan data. Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan pasca pengumpulan data. Dalam hal ini menggunakan analisis induktif, yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain dan analisis *taksonomik*. Analisis domain merupakan proses analisis informasi yang sifatnya masih sangat umum dan menyeluruh terhadap apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Analisis *taksonomik* merupakan analisa lebih lanjut yang perlu dilakukan setelah analisis domain tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan terperinci tentang suatu permasalahan yang diteliti. Teknik ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berperanserta/wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan, yang dapat dilihat di buku lampiran. Pengamatan deskriptif berarti mengadakan pengamatan secara menyeluruh terhadap sesuatu yang ada dalam latar penelitian.

Analisis ini didasarkan pada fokus terhadap salah satu domain (struktur internal domain) dan pengumpulan hal-hal / elemen yang sama. Model yang digunakan dalam analisis ini, peneliti menggunakan tahapan model alir sebagaimana yang telah disampaikan oleh Miles dan Huberman bahwa pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data dan verifikasi data berjalan secara simultan.

3. Sarana Pos dan Telekomunikasi, Sarana pelayanan pos dan telekomunikasi terdiri dari Kantor Pos dan Giro yang telah menjangkau 27 kecamatan, jaringan telepon sebanyak 18.241 SST dan telah menjangkau 27 kecamatan.
4. Sarana Perdagangan, Sarana perdagangan berupa pasar daerah sebanyak 12 buah dengan jumlah pedagang sebanyak 3.083 pedagang dan pasar desa potensial sebanyak 70 buah dengan perkiraan jumlah pedagang sebanyak 7.869 pedagang.
5. Koperasi, Banyaknya koperasi di Kabupaten Bojonegoro adalah 255 buah yang tersebar di hampir semua kecamatan, yang terdiri atas koperasi unit desa (KUD), koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam, koperasi kerajinan, koperasi jasa, koperasi pertanian dan lain-lain, dengan jumlah keanggotaan koperasi berjumlah 108.995 orang dengan total aset senilai Rp. 218.532.119.000 , sedangkan modal koperasi terdiri atas modal sendiri senilai Rp. 78.929.236.
6. Lembaga Keuangan, Lembaga perbankan yang ada terdiri atas Bank BNI, Bank Jatim (BPD), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA), Bank Panin Tbk, Bank Tabungan Pembangunan Nasional (BTPN), Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan sejumlah 4 buah BPR.
7. Sarana Jaringan Air Bersih, Pemenuhan kebutuhan air minum khususnya untuk penduduk dilayani oleh Perusahaan Daerah Air

4 buah, sehingga rasio penduduk terhadap RSUD sebesar 1:157.619 jiwa. Untuk Puskesmas ada sebanyak 35 buah dan Puskesmas Pembantu 68 buah, sehingga rasio penduduk terhadap Puskesmas 1:36.027 jiwa, dan rasio Puskesmas terhadap desa sebesar 1:12,28 atau setiap Puskesmas rata-rata melayani 12 desa.

3. Kesejahteraan Sosial

Pada tahun 2007, jumlah panti sosial yang ada di Kabupaten Bojonegoro adalah sebanyak 11 buah, yang terdiri dari sejumlah 14 panti sosial asuhan anak, 1 panti sosial bina remaja. Potensi dan sumberdaya kesejahteraan sosial meliputi 251 orang PSM, 47 orang Wanita Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (WPKS), 50 orang Satgasos Penanggulangan Bencana Alam (PBA), 14 buah Orsos, 1.077 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, 4.828 Wanita Rawan Sosial, 35 Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Karang Taruna sebanyak 430 buah.

Rincian penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Bojonegoro tahun 2007 adalah : anak terlantar 12.532 anak, anak nakal 105 anak, anak jalanan 67 anak, anak cacat 3.066 anak, wanita rawan sosial ekonomi 4.983 orang, lanjut usia terlantar 6.924 orang, penyandang cacat 3.066 orang, penyandang cacat eks penyakit kronis sebanyak 585 orang, tuna susila 47 orang, gelandangan-pengemis sebanyak 74 orang, korban penyalahgunaan napza 24 orang, keluarga fakir miskin 163.489 orang, keluarga

4. Proses dan Model Komunikasi

Sebelum memahami model komunikasi, terlebih juga harus memahami dulu bagaimana proses dalam suatu model komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, apa yang disampaikan, melalui media apa, dan bagaimana dampaknya. Untuk proses komunikasi yang terjadi pada dialog publik sebagai bentuk penjelasan berikutnya, dalam proses pelaksanaannya dialog publik dilaksanakan satu minggu sekali pada hari jum'at selama kurang lebih dua jam antar jam 13.00 – 15.00. Untuk masyarakat yang menghadiri dialog tersebut sesuai data yang penulis dapatkan dalam berbentuk daftar hadir (tanggal 9 edisi Januari tahun II / 2009) sekitar 60 orang. Teknisnya pada dialog tersebut, telah siap dan hadir oleh jajaran eksekutif pemerintah kabupaten Bojonegoro yang berkepentingan yaitu meliputi Bupati, Wakil Bupati, Kepala Dinas atau Satker (satuan kerja) yang telah ditentukan. Para *stakeholders* inilah yang nantinya atas nama Pemerintah Kabupaten berkomunikasi dengan masyarakat yang hadir pada dialog publik. Adapun model komunikasi pada dialog publik terkait sosialisasi kebijakan pembangunan kepada masyarakat meliputi :

- a. Model komunikasi satu tahap (*One step flow model*). Model ini menyatakan bahwa informasi mengalir langsung berpengaruh pada audiensnya tanpa membutuhkan perantara atau media massa langsung pada audiens. Sebagaimana yang terjadi pada dialog publik itu sendiri, dimana pemerintah berhadapan langsung dengan masyarakat untuk

1. Komponen Model Komunikasi Pembangunan Dalam Sosialisasi Kebijakan Pembangunan

a. Pemerintah

Pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam hal ini bertindak sebagai komunikator (penyampai pesan) tidak hanya bersikap *instruktif*, melainkan komunikatif. Dalam arti, baik dari pemerintah maupun masyarakat terjadi sebuah komunikasi dalam rangka mencapai kesepahaman bersama. Kejelasan program – program dalam bentuk kebijakan mengenai pembangunan dipaparkan kepada masyarakat, misalnya mulai menjelaskan dari tujuan, fungsi, dan solusinya. Interaksi Pemerintah dengan masyarakat menjadi sebuah konsekuensi hubungan timbal balik yang saling berperan serta dalam merumuskan terkait suatu kebijakan.

b. Bentuk Kebijakan Pembangunan

Pengertian bentuk kebijakan disini adalah sebuah *pesan*, kebijakan pembangunan dalam hal ini bukan semata – mata langsung mencakup prioritas pembangunan yang telah terencanakan, namun kebijakan pemerintah disini merupakan *esensi* dari pada kebijakan seluruhnya. Dimulai dari yang bersifat khusus, seperti mencari solusi menyelesaikan suatu permasalahan yang diperoleh dari pengaduan atau saran dari masyarakat.

Dengan demikian diharapkan terpaan media massa dapat tersebar luas disegala penjuru daerah (Multi step flow model), terutama daerah – daerah kabupaten Bojonegoro yang senantiasa ingin mengikuti arus informasi terbaru mengenai perkembangan kabupatennya.

d. Partisipasi Masyarakat

Pengertian partisipasi masyarakat disini adalah sebagai *komunikan*. Seperti yang telah sedikit dikemukakan pada latar belakang di atas, bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu suatu pembangunan tidak dapat diremehkan. Selain itu dalam komunikasi pembangunan yang di utamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat. Eksistensi masyarakat perlu dilibatkan dalam ranah pembangunan daerah. Dalam arti, meskipun kapasitasnya hanya sebagai penerima program, namun hak – hak untuk mengemukakan pendapat sangat diperlukan. Dalam keikutsertaan peneliti pada dialog publik, menurut peneliti ada beberapa tingkat partisipasi ; 1). partisipasi tinggi; aktif, kreatif, diikuti dengan dialog, interaksi berlanjut, 2). partisipasi sedang; lebih sedikit intens, lebih sedikit kreatif, dan menggunakan sedikit dialog, 3). partisipasi rendah; menyarankan sedikit dialog, tidak ada keterlibatan penuh, dan tidak ada kesepakatan perubahan. Untuk partisipasi tinggi pada dialog publik seperti yang telah

masyarakat melalui penyebaran ide – ide dan hal – hal yang baru. *difusi* sebagai proses di mana suatu *inovasi* di komunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antar para anggota suatu sistem sosial. *Difusi* adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan – pesan sebagai ide baru. Sedangkan komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana para pelakunya menciptakan informasi dan saling bertukar informasi untuk mencapai pengertian bersama. Sedangkan bila peneliti mencoba mengkonfirmasi antara temuan dengan teori *difusi inovasi*, bahwa terjadi kesinambungan antara temuan dan teori itu sendiri. Dalam temuan data, dijelaskan bahwa langkah pemerintah kabupaten Bojonegoro dalam menyelenggarakan dialog publik, termasuk saluran yang digunakannya, telah memunculkan adanya proses difusi inovasi yang berkenaan dengan komunikasi pembangunan. Kebijakan dan permasalahan yang di perbincangkan pada dialog publik melibatkan seluruh anggota lapisan sistem sosial, termasuk masyarakat diluar dialog publik yang diterpa media massa radio Malowopoti FM dan Madani FM seluruh elemen masyarakat yang hadir dalam dialog tersebut merupakan indikator bahwa masyarakat yang siap menerima (adopsi) ataupun menolak (rejection) dari suatu *inovasi* dalam hal ini, adalah inovasi melalui kebijakan atau tanggapan dari pihak pemerintah yang bersifat solutif ataupun inovatif. Sebagai contoh adalah kebijakan pemerintah dalam sektor pembangunan ekonomi, dalam kebijakannya pemerintah telah mencanangkan program peternakan kambing dengan bibit etawa melalui *inseminasi* buatan. Inovasi

tersebut secara perlahan telah menjadi suatu adopsi yang dalam hal ini bisa terjadi penolakan ataupun penerimaan oleh masyarakat. Kebijakan tersebut bisa saja menjadi sesuatu yang inovatif bagi masyarakat namun belum tentu juga oleh masyarakat lain. Jadi, kebaruan inovasi tercermin dari pengetahuan, sikap, ataupun putusan terhadap inovasi yang bersangkutan. Dengan begitu, bisa saja sesuatu yang disebut sebagai inovasi bagi suatu masyarakat, namun tidak lagi dirasakan sebagai hal yang baru oleh orang atau masyarakat yang lainnya. Faktor ini semua terjadi karena karakter masyarakat yang majemuk dan pluralis.

Teori lain seperti S – M – C – R, singkatan dari *Source* yang berarti sumber atau komunikator, M singkatan dari *Message* yang berarti pesan, C singkatan dari *Channel* yang berarti saluran atau media, sedangkan R singkatan dari *Receiver* yang berarti penerima atau komunikan. Teori ini menjelaskan komponen – komponen dalam sebuah komunikasi terutama mengenai media atau saluran yang dipergunakan dalam menunjang berlangsungnya suatu komunikasi.

Relevansi atau kesesuaian teori ini dengan komunikasi pembangunan menurut peneliti adalah tercakupnya komponen – komponen yang terdapat pada suatu peristiwa komunikasi pada sosialisasi kebijakan pembangunan di pemerintah kabupaten Bojonegoro. Mulai dari *Source*, (sumber) atau dalam istilah ilmu komunikasi dinamakan komunikator, *Message* (pesan) yang disampaikan, dan (*receiver*) penerima pesan atau komunikan.

Source/sumber dalam penelitian ini adalah pihak eksekutif pemerintah

Bojonegoro selaku sumber pembuat kebijakan, Satker (satuan kerja), bahkan pihak swasta yang masih terkait. Sumber - sumber ini telah disiapkan untuk membantu menyampaikan kejelasan terkait program – program yang disampaikan, selain itu sumber juga bisa dari masyarakat sendiri, mengingat hubungan antar pemerintah adalah interaktif, artinya tanpa disadari baik pemerintah maupun masyarakat dapat menjadi komunikator. Hal itu disebabkan adanya sikap keterbukaan pemerintah Bojonegoro dalam meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat *Message*/pesan, dalam konteks ini adalah pesan yang menyangkut permasalahan pembangunan secara menyeluruh seperti keluhan mengenai pembangunan jalan, kurang puas dengan pelayanan publik, serta hal – hal yang dirasa kurang begitu dipahami oleh masyarakat. Selain itu, pesan juga bisa berupa umpan balik (*feed back*) dari pihak pemerintah ataupun instansi yang bersangkutan, kebijakan – kebijakan maupun ide – ide baru yang dirasa menjadi penting untuk disampaikan kepada masyarakat.

Channel, saluran atau media, dalam hal ini adalah dialog publik itu sendiri, dialog publik merupakan saluran atau media komunikasi primer yang dipergunakan dalam komunikasi tatap muka, kelompok antara pemerintah dan masyarakat Bojonegoro untuk memperbincangkan mengenai hal – hal yang menyangkut suatu kebijakan pembangunan utamanya. Selain itu, saluran atau media komunikasi sekunder adalah melalui surat maupun SMS (pesan pendek). Saluran tersebut berfungsi dan dimaksudkan untuk menerima keluhan, saran atau pengaduan terhadap

proses kebijakan pembangunan yang dinilai masyarakat belum dapat diterima maupun dipahami.

Sedangkan *receiver* atau penerimanya dalam hal ini adalah masyarakat kabupaten Bojonegoro selaku penerima program dan kebijakan dari pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang telah terencanakan.

Kesediaan pemerintah kabupaten Bojonegoro dengan menggelar dialog publik sebagai media sosialisasi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menurut peneliti telah memunculkan konsekuensi hubungan sosial hingga kemudian terbentuk model – model komunikasi, seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok yang prosesnya berlangsung secara dua tahap (*two step flow communication*). Dalam penelitian ini, peneliti sempat berbincang dengan salah satu masyarakat yang mengaku telah menerima suatu informasi mengenai kebijakan pemerintah dari peserta dialog publik. Artinya, besar kemungkinan masyarakat yang mengikuti dialog publik adalah semacam “*agen perubahan*” ataupun “*opinion leader*” yang berfungsi sebagai penyambung informasi berikutnya dengan demikian informasi tersebar dari mulut ke mulut. Mereka tidak hanya meneruskan informasi, tetapi juga menginterpretasi terhadap pesan komunikasi yang mereka terima. Dalam arti ada sejenis pengaruh pribadi (*personal Influence*) ini segera diakui sebagai mekanisme antara yang penting, yang beroperasi antara pesan komunikasi massa dengan tanggapan (perilaku) terhadap pesan itu. Jika suatu gagasan baru datang dari luar ; interpretasi yang diberikan para

Pertama; komponen – komponen komunikasi telah mencakup, dimulai dari pemerintah selaku sumber yang dominan sebagai penyampai pesan pembangunan, kemudian adanya pesan yang disampaikan dalam konteks ini adalah pesan mengenai kebijakan pembangunan termasuk upaya – upaya kebijakan yang mengandung inovatif, Selanjutnya saluran atau media yang digunakan dalam menunjang proses komunikasi dalam kaitannya sosialisasi kebijakan, terutama peran dari pada media massa yang dalam hal ini lebih ditekankan pada radio. Selain itu adanya penerima, yaitu seluruh sistem lapisan masyarakat kabupaten Bojonegoro khususnya. Sebagai penerima program atau kebijakan dari pemerintah setempat. Dan komponen terakhir adalah adanya umpan balik baik dari pemerintah sendiri maupun masyarakat, umpan balik tersebut berupa adanya sikap masyarakat yang turut berperan serta dengan semua keluhan atau masukan – masukan yang ditujukan pemerintah. Sementara untuk pihak pemerintah sendiri adalah adanya bentuk tanggung jawab pemerintah berupa memberikan tanggapan – tanggapan dari apa yang diterima dari masyarakat.

Kedua; adanya keterbukaan pemerintah kabupaten Bojonegoro, terutama dalam pelayanan informasi dan komunikasi terhadap masyarakat. Keterbukaan inilah yang menjadikan hubungan komunikasi pemerintah dan masyarakat terbilang cukup komunikatif. Kebutuhan akan akses komunikasi pemerintah telah diupayakan dengan menyediakan fasilitas – fasilitas yang ada.

Ketiga; dari sisi penampungan aspirasi masyarakat,

terselenggarakannya dialog publik telah membuka celah bagi masyarakat untuk mengungkapkan segala aspirasinya. Dengan tertampungnya aspirasi tersebut pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan – kebijakan yang diinginkan masyarakat dalam bidang pembangunan. Kebijakan – kebijakan pemerintah yang strategis inilah nantinya akan membuka harapan masyarakat bagi kesejahteraannya.

Keempat; antusiasme masyarakat yang masih cukup signifikan dalam mengikuti dialog publik merupakan gejala betapa masyarakat merasa terlibat aktif dalam bersanding dengan pemerintah dalam mencari ataupun merumuskan kebijakan. Sedikit masukan dan saran menjadi bahan – bahan pertimbangan guna mewujudkan pembangunan sesuai cita – cita bersama. Diluar dialog publik masyarakat dapat berkomunikasi dengan pihak pemerintah dengan melalui surat ataupun SMS (pesan pendek).

Kelima ; dialog publik dalam konteks pembangunan terutama dalam iklim demokrasi seperti sekarang ini telah membantu mendidik masyarakat dalam pengembangan karakter masyarakat itu sendiri pengaruh hubungan dengan pemerintah perlahan telah memberikan posisi masyarakat sebagai komponen yang ikut menentukan pengambilan kebijakan dalam pembangunan. Kemudian mengenai kebijakan yang inovatif seperti yang diprogramkan pemerintah dalam sektor peternakan secara perlahan telah membantu masyarakat dalam mengasah *skill* dengan memaksimalkan segala potensi yang ada. Selain itu, masyarakat juga terlatih dalam mencari jalan keluar dalam menghadapi permasalahan. Dampak tersebut terjadi

sosial dengan masyarakat, secara perlahan dialog publik telah membantu menghidupkan iklim demokrasi pada bangsa Indonesia, sebagai negara berkembang. Kebijakan seperti itulah yang menurut peneliti dapat mewujudkan masyarakat yang madani dan menuju pemerintahan yang baik (*good government*).

Keterbukaan pemerintah dengan mampu berdiri diatas semua golongan pada rakyat seperti halnya yang terjadi pada pemerintah kabupaten Bojonegoro hendaknya dapat diikuti oleh daerah – daerah lain. Pada dasarnya semua lapisan elemen masyarakat mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk mengemukakan pendapat ataupun hak untuk mendapat pelayanan yang selayaknya dari pemerintah.

Sejauh ini, jika dibandingkan dengan sebelum – sebelumnya sikap atau langkah pemerintah kabupaten Bojonegoro terbilang cukup baik, khususnya pihak eksekutif. Alangkah baiknya jika hal semacam itu terus dapat ditingkatkan ditengah upaya pembangunan yang terus berproses.

Di sisi lain, bukan sesuatu yang salah jika dimungkinkan dari lembaga jajaran legislatif melakukan hal serupa atau paling tidak partisipasinya sebagai kapasitas wakil rakyat dihadirkan langsung pada dialog publik karena bagaimanapun juga mereka adalah para wakil masyarakat atau rakyat yang terhormat. Dengan begitu *eksistensi* serta kebijakan mereka juga dapat terakomodir oleh masyarakat Bojonegoro secara luas, sejauh kebijakan tersebut berhak diketahui publik. Selain itu hubungan sosial antara pihak legislatif dan masyarakat diharapkan lebih dekat, dan dikenal rakyatnya.

Dengan kata lain sikap seperti eksekutif juga dapat ditunjukkan oleh para wakil rakyat Bojonegoro. Artinya dialog publik bukan hanya wadah komunikasi pemerintah eksekutif dan pihak – pihak yang bersangkutan melainkan wadah komunikasi Pemerintahan Bojonegoro secara keseluruhan dan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat, terutama yang hadir pada dialog publik terdampingi oleh wakilnya yang juga punya kapasitas sebagai pengambil kebijakan di dalam sistem pemerintahan. Karena semua itu tidak lepas dari cita – cita untuk terus membangun Bojonegoro yang pada intinya juga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau rakyat.

